

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahayu, Ani Sri. 2017. *Pemerintahan Daerah (Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya)*. (Malang : Sinar Grafika).

Asy'ari, Hasyim. 2007. *Pilkada : Catatan Hukum dan Politik*. (Semarang : Diponegoro University Press).

Manan, Bagir. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta : Pusat Studi Hukum FH UII).

Fuady, Munir. 2009. *Konsep Negara Demokrasi*. (Jakarta : Retika Aditama).

Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. (Jakarta : Grasindo).

Prihatmoko, Joko J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).

Jeddawi, Murtir. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Sautu Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Investasi Daerah*, (Yogyakarta: UII Press).

Lutfi, Mustafa. 2010. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : UII Press).

Atmosudirdjo, Prajudi. 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 10, (Jakarta : Ghalia Indonesia).

Sunarno, Siswanto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Sunindhia, Y. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta: PT. Rienka Cipta).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

Jurnal

Adelina, Fransica. 2018. Legalitas Penunjukan Pejabat POLRI Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Pada Masa Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. (Universitas Bung Karno. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Volume 15 Nomor 1)

Triwahyuni, Dewi. 2015. Efektifitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT.) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, (*Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 2, Jan – April, Universitas Komputer Indonesia Bandung)

Alamsah, Nandang. 2015. Problematika Pelaksana Tugas (PLT) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak), (*Jurnal Ilmu Pemerintahan*, CosmoGov, Vol.1 No.2)

Dewi Triwahyuni. 2015. Efektifitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (PLT.) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, (*Jurnal Administrasi Negara*, Volume 3, Nomor 2, Jan – April, Universitas Komputer Indonesia Bandung)

Muhammad Syarif Nuh, 2012. Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, (*Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41 Nomor. 1)

Bambang Giyanto, 2014. Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik, (*Jurnal Borneo Administrator* Volume. 5 Nomor. 1)

Rahma Aulia, Fifiana Wisnaeni, 2018. Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Berhalangan Tetap Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengisian Jabatan Wakil Bupati Kabupaten Grobogan), (*Masalah-Masalah Hukum* Jilid 47 Nomor.3)